



## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Nurhayati Nurhayati<sup>1</sup>, M. Nasir<sup>2</sup>, Abdul Mukti<sup>3</sup>, A. Safri<sup>4</sup>, Lias Hasibuan<sup>5</sup>, Kasful Anwar<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan dosen Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, email: [nurhayatirazeq@gmail.com](mailto:nurhayatirazeq@gmail.com)

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: [mhdnasir1970@gmail.com](mailto:mhdnasir1970@gmail.com)

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: [smk.muhammadiyah.btm@gmail.com](mailto:smk.muhammadiyah.btm@gmail.com)

<sup>4</sup>Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: [afri7044@gmail.com](mailto:afri7044@gmail.com)

<sup>5</sup>Dosen Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: [lhas10@yahoo.co.id](mailto:lhas10@yahoo.co.id)

<sup>6</sup>Dosen Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: [kasfulanwarus@gmail.com](mailto:kasfulanwarus@gmail.com)

**Corresponding Author:** Nurhayati Nurhayati<sup>1</sup>

**Abstract:** Dalam kajian ini penulis mencoba mengangkat factor-faktor yang mempengaruhi paradigma berpikir kesisteman pendidikan Islam. Yang menjadi fokus masalah bagi penulis ialah manajemen, pembiayaan, mutu dan pendidikan. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini lebih dideskripsikan dan diklasifikasikan sesuai dengan kondisi penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau library research. Dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa : Manajemen Pembiayaan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta jauh lebih baik. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal dan maksimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama.

**Keyword:** Manajemen, Pembiayaan, Mutu, Pendidikan.

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang, 2003)

Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. (Monita, 2019)

Pada umumnya, pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumberdaya manusia. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari sumbangan alas manfaat terhadap pembangunan social ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomis, politik, dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting untuk memajukan pendidikan adalah aspek pembiayaan pendidikan. (Kadri, 2011)

Penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting dalam konteks adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia menurut amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. (Monita, 2019)

Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk kebutuhan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. (Sudarmono et al., 2021)

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. (Monita, 2019)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya- biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diseluruh Indonesia. (Nasional, 2013)

Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada konsep diatas, maka masalah pembiayaan menjadi sangat strategis untuk dikaji. Masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah utama dalam menjalankan roda pendidikan. Pengelolaan yang baik dalam pembiayaan pendidikan akan berdampak pada mutu pendidikan (Supriani, 2022).

Ini yang menjadi isu utama dalam dunia pendidikan. Isu utama ekonomi pendidikan menurut Elchanan Cohn adalah bagaimana mengidentifikasi dan melakukan pengukuran terhadap nilai ekonomi untuk pendidikan, alokasi sumber-sumber dalam pendidikan, gaji tenaga pendidik, biaya pendidikan dan perencanaan pendidikan. (Safri et al., 2018)

Upaya dalam mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang di terapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah mencapai visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. (Solehan, 2022b)

Artikel ini membahas *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi manajemen pembiayaan?
2. Bagaimana pengaruh mutu pendidikan terhadap manajemen pembiayaan?

## KAJIAN TEORI

### Pengertian Manajemen Pembiayaan

Masalah pendidikan merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau disebabkan oleh karena hal yang lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik. (Ferdin, 2013)

Pembiayaan pendidikan tidak lepas dan persoalan ekonomi pendidikan, Johns dan Morphet mengemukakan bahwa "pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern". Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan-pennasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenali pembiayaan pendidikan ini. (Sudarmono et al., 2021)

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. (Azhari & Kurniady, 2016)

Biaya pendidikan, menurut Supriyadi merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental-input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. (Smp & Banjar, 2009)

Sementara menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menajankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. (Fattah & Gautama, 2017)

Sedangkan menurut Nanang Fattah biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. (Fattah & Gautama, 2017)

Manajemen Pembiayaan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Solehan, 2022b), (Mesiono et al., 2021), (Azhari & Kurniady, 2016), (Nafisah & Widiyanto, 2017), (Ararat et al., 2019), (Sudarmono et al., 2021), (Smp & Banjar, 2009), (Fattah & Gautama, 2017), (Riadi, 2016).

### **Mutu Pendidikan**

Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengatur tentang pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam wujud otonomi daerah. Pada pasal 11 UU no. 22 tahun 1999 mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan yaitu : pekerjaan umum, kesehatan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertambangan, koperasi, tenaga kerja serta pendidikan dan kebudayaan. (Nurhayati, 2021)

Peningkatan mutu pendidikan selama ini belum sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah strategi pembangunan pendidikan yang lebih bersifat “*input oriented*” dan bersifat “*macro oriented*” yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat pusat institusi pendidikan masih mengandalkan pola manajemen lama yang dianggap masih kurang efektif dan efisien sehingga hasilnya kurang maksimal, seharusnya dikembangkan pola manajemen pada kepuasan pelanggan, artinya bahwa mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen mutu atau *total quality management*. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah melalui otonomi pendidikan dengan pendekatan yang jelas, terarah, serta berhasil guna, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam otonomi pendidikan. (Suti, 2011)

Mutu lulusan pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal diantaranya kurikulum, tenaga pendidik, kepemimpinan kepala sekolah, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen, sekolah, dan lingkungan sekolah. Sementara faktor dari luar adalah dukungan masyarakat, dan kebijakan pendidikan yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal sangat besar peranannya dalam mencapai tujuan pendidikan. (Safitri, 2021)

Mutu belajar-mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh keberadaan kepala sekolahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin berkualitas kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin baik mutu sekolah yang dipimpinnya.

Mutu Pendidikan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah : (Aziz, 2015), (Nurlindah et al., 2020), (Syahrul & Yuniarni, 2020), (Priatna, 2018), (Suderadjat, 2005), (Azhari & Kurniady, 2016), , (Suti, 2011).

## METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (**Library Research**). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari **Mendeley**, **Scholar Google** dan media online lainnya.

Penelitian kualitatif lebih dideskripsikan dan diklasifikasikan sesuai dengan kondisi bidang penelitian. Paradigma penelitian kualitatif adalah berpikir induktif. Setiap pertanyaan penelitian diperlakukan sebagai kasus mikro dan kemudian dibawa ke konteks yang lebih umum (Cruz, 2013). Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Mutu Pendidikan terhadap Manajemen Pembiayaan

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar. (Suderadjat, 2005)

Menurut Ismail, penerapan manajemen mutu dalam dunia pendidikan merupakan memerlukan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, manajemen organisasi yang baik dan penyediaan personil yang memadai dalam menjalankan proses yang baik sehingga menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas tinggi (Ismail et al., 2021).

Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu: (1). Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut. (2). Perlu ditumbuhkembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan. (3). Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus. (4). Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan. (Suderadjat, 2005)

Manajemen Peningkatan Mutu yang merupakan paradigma baru bagi manajemen pendidikan di Madrasah memiliki prinsip (1) Peningkatan mutu harus dilaksanakan di

madrasah, (2) Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik, (3) Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (4) Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di madrasah, dan (5) Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa madrasah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua dan masyarakat. (Nurhayati, Lias Hasibuan, 2021)

Manajemen Pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. (Riadi, 2016)

Dalam definisi ini ada tiga kata kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi dan distribusi. Tiga kata kunci inilah yang pada akhirnya menjadi fungsi dari pembiayaan pendidikan itu sendiri. 1) Optimalisasi sumber dana Fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh. 2) Alokasi Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses financial decision. Di sinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan. (Riadi, 2016)

Kebijakan dalam menentukan alokasi ini harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan. 3) Distribusi Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Dalam fungsi manajemen pembiayaan pendidikan, dikatakan bahwa dana (biaya) memainkan peran penting dalam pendidikan pada tiga area; pertama, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; kedua, keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik dan ketiga, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. (Riadi, 2016)

Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga. Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, maka kita harus memerhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaannya. Diantara prinsip manajemen pembiayaan pendidikan adalah: 1) Akuntabilitas (accountability) 2) Transparan 3) Integritas 4) Konsistensi 5) Efektif dan efisien. (Riadi, 2016)

Pada prinsipnya sumber pembiayaan pendidikan bisa diperoleh dari berbagai sumber selama sumber itu diperoleh secara halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun peserta didik itu sendiri. (Azhari & Kurniady, 2016)

Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah proses manajerial suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. (Nurhayati et al., 2021)

Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah/madrasah bersama komponen-komponen lainnya. Pembiayaan pendidikan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karenanya jika madrasah/lembaga ingin mendapatkan dana dari partisipasi masyarakat maka

madrrasah/lembaga harus memiliki program yang bagus. Kepercayaan memang dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana. (Solehan, 2022a)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan pada penelitian manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif. (Solehan, 2022a)

### Saran

Saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Manajemen Pembiayaan terhadap kualitas mutu pendidikan di sekolah pada semua tipe dan level organisasi atau sekolah. Kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lainnya adalah seperti Perencanaan, Kebijakan Pemerintah dan Faktor Sumberdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi penelitian (petunjuk praktis untuk pemecahan masalah bisnis, penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi)*. Deepublish Store (CV. Budi Utama).
- Ararat, M., Mine, A., & Cetin, A. T. (2019). Aebi, V, G Sabato, dan M Schmid. "Risk Management, Corporate Governance, and Bank Performance in The Financial Crisis." *Journal of Banking & Finance*, 2012: 3212-3226. Ali, M, YL Ng, dan CT Kulik. "Board Age and Gender Diversity: A Test of Competing Linear an. *SAGE*, 521, 548.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2).
- Aziz, A. (2015). Peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 1–13.
- Cruz, A. P. S. (2013). Metode penelitian dan pengembangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fattah, N., & Gautama, B. P. (2017). Penerapan Biaya Pendidikan Berbasis Activity-Based Costing dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 2(1), 19–32. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v2i1.6020>
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Ismail, F., Pawero, A. M. D., & Umar, M. (2021). Education planning and its implications for education policy during the covid-19 pandemic. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 3(2), 110. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v3i2.4441>
- Kadri, hanif al. (2011). *Artikel Pembiayaan Dalam Pendidikan*.
- Mesiono, M., Suswanto, S., Lubis, R. R., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 119–134.

- Monita, D. F. (2019). *Pembiayaan dalam pendidikan*.
- Nafisah, D., & Widiyanto, W. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 788–797.
- Nasional, D. P. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. *Departemen Pendidikan Nasional*, 44(2), 8–10.
- Nurhayati, Lias Hasibuan, K. I. R. (2021). Determinas Minat Belajar Dan Sikap Terhadap Prestasi Belajar Melalui Kreativitas Mahasiswa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(10), 2013–2015.
- Nurhayati, Afrizawati, & Rivaldo, Y. (2021). Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Investigatif Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan Representasi Matematis Siswa Sekolah Dasar. *Pendidikan Guru MADrasah Ibtidaiyah*, 5, 49–58. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/>
- Nurhayati, N. (2021). Manajemen POACH pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembelajaran Luring di SDII Luqman Al Hakim Batam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 381–394.
- Nurlindah, N., Mustami, M. K., & Musdalifah, M. (2020). Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13893>
- Priatna, A. (2018). Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(1), 80–90.
- Riadi, A. (2016). Pendidikan Karakter Di Madrasah/Sekolah. *Ittihad*, 14(26), 1–10. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.868>
- Safitri, W. (2021). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FLASHCARD TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB KELAS II DI SDI INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM 02 BATAM. *JURNAL AS-SAID*, 1(2), 52–59.
- Safri, Y. F., Arifudin, R., & Muslim, M. A. (2018). K-Nearest Neighbor and Naive Bayes Classifier Algorithm in Determining The Classification of Healthy Card Indonesia Giving to The Poor. *Scientific Journal of Informatics*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.15294/sji.v5i1.12057>
- Smp, D. I., & Banjar, N. (2009). *Educational fees analysis in the implementation of school based management in smp negeri 1 banjar*. 1–13.
- Solehan. (2022a). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>
- Solehan, S. (2022b). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Menengah, S. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Suderadajat, H. (2005). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS): Peningkatan mutu pendidikan melalui....* Cipta Cekas Grafika.
- Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. *Jurnal Medtek*, 3(2), 1–6.
- Syahrul, & Yuniarni. (2020). Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan Islam. *Shautut Tarbiyah*, 26(November), 316–340. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengelolaan+lembaga+pendidikan+nonformal&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DpFwiz37IOqWJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengelolaan+lembaga+pendidikan+nonformal&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DpFwiz37IOqWJ)
- Undang-Undang, R. I. (2003). no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Bandung: Citra Umbara*.